

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku:*

- Aminuddin Salle, dkk. 2011. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. ASPublishing.Makassar.
- Aminuddin Salle. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Kreasi Total Media. Yogyakarta.
- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Elza Syarief. 2012. *Menuntaskan Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta.
- H.M Arba. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ida Nurlinda. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria (Perspektif Hukum)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mudakir Iskandar. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Bhuana Ilmu Poluler Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Mudakir Iskandar Syah. 2018. *Pembebasan Tanah dan Reklamasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Penerbit Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Maria S.W. Sumarjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Nurul Qamar, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rusmadi Murad. 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Supriadi. 2008. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika. Jakarta.

Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.

-----, 2009. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.

-----, 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana. Jakarta.

*Perundang-undangan:*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 *Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan*,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

*Karya ilmiah/jurnal:*

Agung Basuki Prasetyo, “Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Fakultas Hukum , Universitas Diponegoro” Administrative Law & Governance Journal, Vol. I Edisi 3 Agustus 2018. Website: [ejournal2.undip.ac.id](http://ejournal2.undip.ac.id), diakses pada 11 November 2020, pukul 03.29 WITA.

Diana Kolompoy, “Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum di Tinjau dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960”, Jurnal Lex Privatum Vol. VII/No.3/Mar/2019. Website: [ejournal.unstrat.ac.id](http://ejournal.unstrat.ac.id) diakses pada tanggal 20 Desember 2020, pukul 09.30 WITA.

Farida Patittingi, “Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum Ammana Gappa. Vol. 19 Nomor 4, Desember 2011. Website: [journal.unhas.ac.id](http://journal.unhas.ac.id) diakses pada 11 November 2020, pukul 11.45 WITA.

Muhammad Ilham Arisaputra. *Accesreform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 2015. Website: [scholar.google.co.id](http://scholar.google.co.id), diakses pada 11 November 2020, pukul 03.15 WITA.

Muwahid. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Press. Surabaya. Ebook. <http://www.digilib.uinsby.ac.id>. Diakses pada 22 November 2019, pukul 14.32 WITA.

Rahayu Subekti, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis, Dan Penerapannya Di Indonesia)”, Jurnal Yustisia. Vol. 5, Nomor 2 Mei-Agustus 2016. Website: [jurnal.uns.ac.id](http://jurnal.uns.ac.id), diakses pada 11 November 2020, pukul 03.27 WITA.

*Internet:*

<http://www.sipp.pn-sengkang.go.id>, diakses pada 15 November 2019, pukul 14.30 WITA.

<http://www.pu.go.id>, diakses pada 12 Januari 2020, pukul 12.49 WITA.

<http://www.pusatdata.wajokab.go.id>, diakses pada 5 Agustus 2020, pukul 13.20 WITA.

<http://www.kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 8 Agustus 2020, pukul 15.30 WITA

*Sumber lain:*

Pra Penelitian di Kantor Desa Paselloreng pada Jumat, 27 Desember 2019.

Penelitian di Kantor BPN Kabupaten Wajo pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Penelitian di Kantor Kecamatan Gilireng pada Rabu, 7 Oktober 2020.

Penelitian di Desa Paselloreng pada Senin, 19 Oktober 2020.

# LAMPIRAN



SRN CO 0001392

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tlp/Fax (0485) 323649  
Website : [dpmtsp.wajokab.go.id](http://dpmtsp.wajokab.go.id), Email : [dpmtsp.wajokab@gmail.com](mailto:dpmtsp.wajokab@gmail.com)

**IZIN PENELITIAN / SURVEY**  
**Nomor : 1393/IP/DPMTSP/2020**

Membaca : Surat Permohonan **ANDI PUJI AYU** Tanggal **29-09-2020**  
Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

Memperhatikan : 1. Surat Dekan Universitas Hasanuddin Nomor : 5890/UN4.5.3/PT.00/2020 Tanggal 21-September-2020 Perihal : Permohonan Izin Penelitian  
2. Rekomendasi Tim-Teknis Nomor **00624/IP/TIM-TEKNIS/IX/2020** Tanggal **29-09-2020** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY kepada :

Nama : **ANDI PUJI AYU**  
Tempat / Tgl Lahir : **ATAPANGE, 05 OKTOBER 1998**  
Alamat : **ATAPANGE**  
Universitas / Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
Judul Penelitian : **ANALISIS SENGKETA TANAH YANG TIMBUL DARI KEGIATAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN PASSELLORENG DI GILIRENG KABUPATEN WAJO**  
Lama Penelitian : **28 SEPTEMBER 2020 s/d 28 OKTOBER 2020**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Peneliti tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat

Ditetapkan di : Sengkang  
pada tanggal : **29 September 2020**



KEPALA DINAS,

**Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.**

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP : **19651128 199002 1 001**

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo
  2. Kepala Instansi Tempat Penelitian
  3. Camat Setempat
  4. Pertinggal

No. Reg : **0624/IP/DPMTSP/2020**

Retribusi : **Rp.0.00**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Jalan Andi Lantara No. 36 Telp. (0485) 21125 Sengkang

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 01 / S.Kt-100.UP.01/1/2021**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABD. SALAM, S.E  
NIP : 197409081993031002  
Jabatan : Kasubag Tata Usaha

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama : ANDI PUJI AYU  
Alamat : Atapange, 05 Oktober 1998  
Alamat : Atapange  
Perguruan Tinggi : Univertas Hasanuddin

Telah melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dari tanggal 28 September 2020 sampai tanggal 28 Oktober 2020 untuk judul skripsi "Analisis Sengketa Tanah yang Timbul Dari Kegiatan Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Bendungan Paselloreng di Gilireng Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 11 Januari 2021  
An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Wajo  
Kasubag Tata Usaha

  
ABD. SALAM, SE  
NIP. 197409081993031002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN GILIRENG

Alamat : Jalan poros polewali No.4 KP.90954

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 21 /KG

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Gilireng Kabupaten Wajo menerangkan bahwa :

Nama : ANDI PUJI AYU  
Tempat/Tgl lahir : Atapange, 05 Oktober 1998  
Alamat : Atapange, Kecamatan Majauleng  
Universitas/Lembaga : Universitas Hasanuddin  
Lama Penelitian : 28 September 2020 s/d 28 Oktober 2020

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Kantor Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS SENGKETA TANAH YANG TIMBUL DARI KEGIATAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN PASELLORENG DI GILIRENG KABUPATEN WAJO".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gilireng, 13 Januari 2021



Camat Gilireng  
Kasi Trantib

ANDI FANZIR, S.Pd  
NIP. 19660125 200902 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN GILIRENG  
DESA PASELLORENG**

ALAMAT : JALAN. POROS DESA PASELLORENG, KODE POS 90954

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 045/075/S.Ket-DPSL/1/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ANDI JUSMAN  
Jabatan : Kepala Desa Paselloreng, Kec. Gilireng, Kab. Wajo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudari :

Nama : **ANDI PUJI AYU**  
Tempat/Tgl Lahir : Atapange, 05 Oktober 1998  
Alamat : Atapange, Kec. Majauleng, Kab. Wajo  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN

Yang tersebut namanya di atas telah melakukan penelitian dan pengambilan Data di Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dari bulan September 2020 sampai bulan November 2020 dengan tujuan penyusunan Skripsi "Analisa Sengketa Tanah yang Timbul dari Kegiatan Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Bendungan Paselloreng di Gilireng Kabupaten Wajo".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Paselloreng, 05 Januari 2020  
Kepala Desa Paselloreng

